BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kebijakan pemerintah dan dukungan regulasi yang semakin kuat. Bank syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia, terutama dalam mendukung inklusi keuangan yang adil dan berbasis prinsip syariah. Perkembangan ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan alternatif keuangan yang tidak bergantung pada bunga, serta memberikan solusi keuangan yang lebih etis dan transparan.

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Keuangan Syariah Periode Desember

Tahun	Perbankan Syariah	BUS	UUS	BPRS
2020	608,89	397,07	196,88	14,94
2021	693,80	441,79	234,95	17,06
2022	802,26	531,86	250,24	20,16
2023	892,17	594,71	274,28	23,18
2024	980,30	664,61	290,65	25,03

Sumber: OJK, 2024

Hingga akhir 2024, total aset perbankan syariah di Indonesia tercatat mencapai Rp980,30 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Bank Umum Syariah (BUS) yang mencapai Rp664,61 triliun. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mencatatkan Rp290,65 triliun dan Rp25,03 triliun. Dalam laporan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam sektor perbankan syariah, yang juga tercermin dalam peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan

(PYD), yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,09% dan 9,88% pada periode tersebut (OJK, 2024).

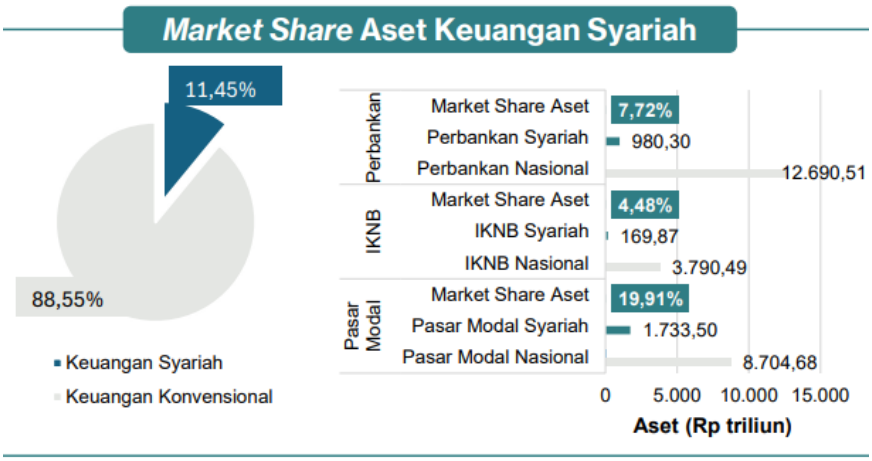

Gambar 1.1 Market Share Aset Keuangan Syariah Periode Desember (OJK, 2024)

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), market share keuangan syariah hingga akhir tahun 2024 baru mencapai 11,45 persen, sementara keuangan konvensional masih mendominasi sebesar 88,55 persen. Jika dilihat lebih rinci, perbankan syariah mencatat market share sebesar 7,72 persen dengan aset mencapai Rp980,30 triliun, jauh tertinggal dibandingkan total aset perbankan nasional yang mencapai Rp12.690,51 triliun. Pada sektor industri keuangan non-bank (IKNB), porsi aset syariah hanya 4,48 persen atau senilai Rp169,87 triliun, dibandingkan dengan IKNB nasional yang mencapai Rp3.790,49 triliun. Sementara itu, pasar modal syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pangsa 19,91 persen dan total aset Rp1.733,50 triliun, meskipun tetap lebih kecil dari pasar modal nasional yang mencapai Rp8.704,68 triliun. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun

keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan signifikan, dominasi sistem keuangan konvensional masih sangat kuat. Oleh karena itu, terdapat peluang besar sekaligus tantangan untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Di Indonesia 2019-2024 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Bank syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan produk dan layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga berkontribusi pada sektor riil melalui pembiayaan usaha kecil, pendidikan, dan infrastruktur, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024). Untuk memperkuat pertumbuhan sektor ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bank Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program strategis. Salah satu program utama adalah Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027. Program ini menekankan pentingnya sinergi antara sektor perbankan, lembaga ekonomi syariah, dan pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, serta memperkuat peran bank pembangunan daerah dalam mendukung prioritas pembangunan ekonomi di daerah (OJK, 2023).

Melalui RP3SI, OJK berharap dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat keberlanjutan sektor perbankan syariah. Hal ini juga menjadi penting mengingat perbankan syariah dapat memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan

landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta komitmen dari OJK dan lembaga terkait, bank syariah di Indonesia semakin menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Ke depan, diharapkan sektor ini dapat terus berkembang, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh bank syariah adalah pengungkapan akuntabilitas yang masih perlu ditingkatkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi isu utama, terutama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas pada bank-bank ini, sehingga dapat menemukan cara untuk memperbaikinya.

Secara keseluruhan, perkembangan bank syariah di Indonesia membawa dampak positif tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, pengungkapan informasi yang lebih akurat dan transparan menjadi kunci dalam memastikan bahwa bank syariah dapat terus tumbuh dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Pengungkapan akuntabilitas dalam perbankan syariah merupakan aspek fundamental yang mencerminkan tanggung jawab lembaga terhadap pemangku kepentingan, baik secara vertikal kepada Allah SWT maupun horizontal kepada masyarakat dan regulator. Dalam konteks ini, transparansi menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan

prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas (Wahyuni & Soumena, 2025).

Menurut penelitian oleh Wahyuni & Soumena, (2025), transparansi dalam lembaga keuangan syariah mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, rincian transaksi berdasarkan akad yang digunakan, serta informasi mengenai pengelolaan dana-dana khusus seperti zakat dan kebajikan. Akuntabilitas dalam keuangan syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan akuntabilitas konvensional, mencakup tanggung jawab kepada deposan, investor, regulator, dan masyarakat umum. Mekanisme akuntabilitas ini melibatkan audit keuangan dan audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional.

Evaluasi terhadap transparansi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya positif dalam menyediakan informasi kepada publik, tingkat transparansi masih berada pada kategori "cukup". Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam penyajian laporan yang terperinci, keterbacaan, serta konsistensi narasi terkait akad dan Distribusi Hasil Usaha (DHU). Meskipun informasi keuangan dapat diakses melalui situs web perusahaan, peningkatan transparansi masih dapat dilakukan, antara lain melalui penyediaan laporan interaktif, penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik non-akuntan, serta peningkatan frekuensi dan kedalaman pelaporan non-keuangan seperti keberlanjutan dan kepatuhan syariah (Adila Misbahussururi, 2025).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Bank Syariah Indonesia, misalnya, berpegang pada lima prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran (TARIF). Implementasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Selain itu, pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) menjadi elemen penting dalam pelaporan sejak tahun 2012 sdalam menunjukkan akuntabilitas sosial bank syariah. ISR mencakup informasi mengenai kontribusi bank terhadap kegiatan sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, dan program pemberdayaan masyarakat. Pengungkapan ini tidak hanya memenuhi kewajiban sosial, tetapi juga memperkuat citra positif bank di mata publik dan meningkatkan kepercayaan nasabah (Pangesti & Pramono, 2022).

Dengan demikian, pengungkapan akuntabilitas dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup transparansi laporan keuangan, tetapi juga integritas dalam pelaksanaan prinsip syariah, penerapan GCG yang efektif, dan kontribusi sosial yang nyata (Az-zahra et al., 2022). Peningkatan dalam aspek-aspek tersebut akan memperkuat posisi bank syariah dalam industri perbankan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Bank syariah seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola struktur leverage mereka, khususnya karena karakteristiknya yang berbasis pada prinsip-prinsip bagi hasil dan bukan bunga (Rostiani & Sukanta, 2019). Tingkat leverage

yang tinggi akan mempengaruhi transparansi dalam pengungkapan keuangan, karena bank syariah harus memastikan bahwa rasio utang yang tinggi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut dikatakan dalam penelitian Mubarok et al., (2025) ketika bank memiliki leverage tinggi, bank mengalami kesulitan dalam menjaga akuntabilitas terkait kewajiban finansialnya, terutama dalam hal kewajiban yang terkait dengan pembiayaan berbasis utang. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas bank, karena informasi terkait kewajiban dan pinjaman berbunga mungkin sulit untuk disajikan secara transparan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, *Leverage* juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas. Bank dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kewajiban untuk lebih transparan dalam melaporkan keadaan keuangannya untuk mengurangi risiko ketidakpastian bagi pemangku kepentingan. Sebaliknya, bank dengan leverage rendah mungkin lebih sedikit membutuhkan pengungkapan yang mendalam, meskipun hal ini tetap menjadi pertimbangan penting dalam manajemen risiko (Mirwan & Amin, 2020). diukur dengan rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*/DAR), mencerminkan sejauh mana bank menggunakan dana pinjaman untuk membiayai asetnya (Umiyati & Baiquni, 2019). Dalam konteks bank syariah, leverage tidak hanya berdampak pada struktur keuangan, tetapi juga memengaruhi pengungkapan akuntabilitas, terutama dalam aspek sosial dan syariah.

Penelitian oleh Dwiyanti et al., (2024) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

(ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori stakeholder, yang menyatakan bahwa bank dengan leverage tinggi cenderung lebih transparan dalam pengungkapan sosial untuk menjaga kepercayaan kreditor dan investor.

Variabel lain yang tidak kalah penting adalah *Investment Account Holder* (IAH), sumber pembiayaan yang penting, namun pengelolaan dan pengungkapan terkait dana ini sering kali kurang transparan, terutama dalam hal pengawasan. Hal tersebut dijelaskan pada penelitian Aida & Firdaus, (2024) bahwa pemegang rekening investasi berbagi keuntungan merupakan jenis investor ekuitas tanpa hak tata kelola yang dimiliki oleh kreditur atau pemegang saham menimbulkan masalah besar dalam pengawasan. Keterbatasan dalam pengawasan atas pengelolaan dana oleh nasabah menimbulkan tantangan bagi regulator.

Dalam konteks bank syariah, IAH berperan dalam menentukan aliran dana dan pembiayaan yang akan diberikan. Pengelolaan IAH yang baik dan transparan akan memperkuat akuntabilitas bank dan memberikan keyakinan kepada nasabah tentang pengelolaan dana yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. *Investment Account Holder* (IAH) merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur perbankan syariah, terutama dalam produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Keberadaan IAH tidak hanya memengaruhi aspek keuangan, tetapi juga berimplikasi pada tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah, khususnya dalam hal transparansi dan tanggung jawab sosial (Najah & Mukhibad, 2022).

Penelitian oleh Hariyanti & Annisa, (2021) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi IAH, semakin besar pula dorongan bagi bank syariah untuk meningkatkan pengungkapan informasi terkait kinerja sosial dan syariah. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam beberapa kasus, bank syariah lebih fokus pada prinsip bagi hasil dan tidak terlalu memaksimalkan profitabilitas jangka pendek, yang dapat memengaruhi keputusan terkait pengungkapan akuntabilitas. Bank syariah harus dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana profitabilitas mereka dihitung, serta bagaimana pembagian hasil dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dijelaskan pada penelitian Kalbuana et al., (2019) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia . Hal ini mungkin disebabkan oleh fokus bank syariah yang lebih pada kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial, daripada pada pencapaian laba semata.

Profitabilitas, yang sering diukur melalui *Return on Assets* (ROA), mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset atau ekuitas yang dimiliki (Prastika, 2013). Dalam konteks perbankan syariah, profitabilitas tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga memengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sosial dan syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk menyeimbangkan antara pencapaian

kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial. Pengungkapan akuntabilitas yang transparan dan akurat tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Penelitian oleh Yusuf & Shayida, (2020) mengkaji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR, mengindikasikan bahwa bank dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan informasi sosial dan syariah untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.

Ukuran bank atau *Bank Size* juga menjadi salah satu factor yang dapat mengungkapkan akuntabilitas dalam Bank Syariah. Pada umumnya *Bank Size* diukur melalui total aset, memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana bank syariah mengungkapkan akuntabilitas sosial dan syariah melalui *Islamic Social Reporting* (ISR). Bank dengan ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak, struktur organisasi yang lebih kompleks, dan ekspektasi yang lebih tinggi dari pemangku kepentingan, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan tahunan mereka (Nusron & Diansari, 2021).

Bank besar seringkali dihadapkan pada masalah kompleks terkait akuntabilitas pelaporan ISR, yang melibatkan aspek transparansi, pengaruh dari berbagai pemangku kepentingan, dan upaya untuk mempertahankan citra positif. Meskipun mereka memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengelola laporan,

kompleksitas internal dan tekanan eksternal sering mengarah pada praktik *greenwashing* atau pelaporan yang kurang mendalam (Hariyanti & Annisa, 2021a).

Penelitian Wijayanti et al., (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank dengan ukuran besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dan lebih mendalam, serta memiliki tekanan yang lebih besar dari pemangku kepentingan untuk memenuhi harapan mereka terkait tanggung jawab sosial dan syariah.

Meskipun sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, penelitian mengenai pengungkapan akuntabilitas di bank syariah masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menekankan pada pengungkapan akuntabilitas dalam konteks bank konvensional atau pada aspek-aspek yang lebih terbatas, seperti pengungkapan keuangan atau kepatuhan terhadap regulasi syariah.

Salah satu gap penelitian yang signifikan adalah kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji pengungkapan akuntabilitas bank syariah melalui *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai proksi. ISR merupakan alat pengungkapan yang penting untuk menunjukkan bagaimana bank syariah bertanggung jawab secara sosial dan sesuai dengan prinsip syariah. Faktor-faktor ini memiliki hubungan yang kompleks dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan. Meskipun bank dengan ukuran lebih besar dan profitabilitas tinggi lebih memungkinkan memiliki pelaporan ISR yang lebih baik, mereka tetap dihadapkan pada tantangan terkait kompleksitas organisasi dan tekanan eksternal. Sementara

itu, bank dengan leverage tinggi dan IAH yang besar terdorong untuk meningkatkan kualitas laporan ISR sebagai bentuk komitmen sosial dan transparansi terhadap pemangku kepentingan mereka.

Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang pentingnya transparansi dalam laporan keuangan, pengungkapan sosial yang mencerminkan tanggung jawab sosial bank syariah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan masih belum banyak dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa kajian yang mengkaji pengungkapan akuntabilitas bank syariah dengan menggunakan ISR sebagai proksi masih jarang ditemukan.

Penelitian ini memberikan ***novelty*** dengan menggunakan ISR sebagai proksi pengungkapan akuntabilitas, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan menambahkan variabel-variabel penting seperti IAH, Profitabilitas, dan Ukuran Bank, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur mengenai pengungkapan akuntabilitas di bank syariah, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam mendorong pengungkapan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konsep yang lebih luas tentang akuntabilitas sosial, yang mencakup pengungkapan tidak hanya mengenai kinerja finansial tetapi juga mengenai kontribusi sosial bank syariah terhadap masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan tujuan utama dari sistem perbankan syariah itu sendiri.

Novelty penelitian ini juga terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan ISR dalam konteks yang lebih komprehensif. Sebelumnya,

banyak penelitian yang menganggap pengungkapan akuntabilitas bank syariah hanya terbatas pada laporan keuangan atau pengungkapan terkait kepatuhan syariah. **Urgensi** dalam penelitian ini terletak pada Bank syariah di Indonesia yang tidak hanya berperan dalam aspek finansial, tetapi juga berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang lebih luas sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebutkan dalam dalil Qur'an surah Al-Baqarah 2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*."

ketidaktransparanan dalam transaksi atau laporan bisa mengarah pada kerugian sosial dan perpecahan. Bank syariah yang tidak mengungkapkan secara terbuka dan jelas dampak dari operasional mereka dapat berisiko terlibat dalam praktik greenwashing atau penyembunyian dampak negatif yang sebenarnya ada. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan bank syariah. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang pengungkapan akuntabilitas dalam bank syariah, yang mencakup aspek keuangan dan sosial, menjadi sangat penting.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *profitabilitas* terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Bank Size* terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *profitabilitas* terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Bank Size* terhadap pengungkapan akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari sisi teoritis maupun praktis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi sektor perbankan syariah di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang perbankan syariah, khususnya dalam topik pengungkapan akuntabilitas. Dengan menggabungkan variabel *leverage***,** *Investment Account Holder* (IAH)**,** *profitabilitas***,** dan *Bank Size*, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah, serta memperkenalkan ISR (*Islamic Social Reporting*) sebagai proksi untuk variabel akuntabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah: Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi bank syariah dalam meningkatkan pengungkapan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sosial dan syariah. Dengan memahami pengaruh *leverage***,** *profitabilitas***,** IAH**,** dan *Bank Size*, bank dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dan pelaporan akuntabilitas mereka.
b. Bagi Pengelola Bank Syariah: Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan tata kelola perusahaan (GCG), serta mendorong lebih banyak pengungkapan informasi yang relevan dengan prinsip syariah dan tanggung jawab sosial yang lebih transparan**.**

c. Bagi Regulator (OJK dan Bank Indonesia): Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi otoritas pengawas untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada bank syariah, serta mendukung pengembangan peraturan yang lebih efektif untuk memastikan praktik-praktik perbankan syariah yang baik.